

# LARAS BAHASA NASKAH PIDATO PEJABAT: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR KEPADA DPRD KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

THE BARREL LANGUAGE SPEECH OFFICIALS ACCOUNTABILITY  
REPORT TO PARLIAMENT GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN IN 2012

**Wahyu Damayanti**

Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat  
Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat  
wahyu\_b7320@yahoo.com

Naskah Diterima Tanggal : 21 Oktober 2014  
Naskah Direvisi Terakhir Tanggal : 15 Desember 2014

## *Abstract*

*Language speech made Governor of West Kalimantan is the meeting place in this study. The use of speech language in fact governor is a public figure who may be a case for itself for its citizens. The purpose of research described pillihan use of words (diction) and spelling (capital letters and punctuation) Report on the Governor of West Kalimantan in 2012. Based on the purpose of this study the method used is descriptive method of analysis and interpretation techniques. Results of the research that is still contained inaccuracies such as cutting down the use of diction, foreign words, and reasoning. Which included the use of capital letters in the middle of a sentence that is not consistent, as well as the inclusion of punctuation colons and semicolons are not right.*

*Keywords: Language, Speech, Governor*

## Abstrak

Laras bahasa naskah pidato yang disampaikan Gubernur Kalimantan Barat merupakan fokus dalam penelitian ini. Penggunaan bahasa dalam naskah pidato gubernur yang notabene merupakan figur masyarakat (*public figure*) dapat menjadi sorotan tersendiri bagi warganya. Tujuan penelitian mendeskripsikan penggunaan pilihan kata (diksi) dan ejaan (huruf kapital dan tanda baca) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Barat 2012. Berdasarkan tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik analisis interpretasi. Hasil dari penelitian ini yaitu masih terdapat ketidaktepatan penggunaan diksi di antaranya penyingkatan kata, kata asing, dan penalaran. Penggunaan huruf kapital yang dicantumkan di tengah kalimat yang tidak taat asas, begitu juga pencantuman tanda baca titik dua dan titik koma yang tidak tepat.

*Kata kunci: Bahasa, Pidato, Gubernur*

**Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi bertanggung jawab kepada DPRD. Agenda tiap tahun gubernur melaporkan secara tertulis maupun lisan di hadapan seluruh anggota dewan. Laporan keterangan pertanggungjawaban bertujuan untuk melaporkan hasil kinerja gubernur beserta para stafnya selama tahun anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ragam bahasa pejabat memiliki ranah tersendiri. Sebagai seorang pejabat publik dan sebagai pemegang tampuk pemerintahan provinsi tentu saja merupakan figur tersendiri bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bahasa yang digunakan pasti memiliki koridor tersendiri atau bisa juga memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh orang awam. Bukan berarti sebagai pemimpin tidak boleh salah dalam penggunaan bahasanya. Setidaknya hal ini bisa diminimalisir baik secara makna maupun kosakata yang dipilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan PP nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepala daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada masyarakat. Dalam laporan pertanggungjawaban, pemerintah daerah menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui DPRD tentang hasil-hasil yang telah dicapai dan yang belum dicapai selama satu tahun dalam satu periode memangku jabatan sebagai kepala daerah. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi; tugas pembantuan; dan tugas umum pemerintahan. LKPJ terdiri atas LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan.

Dalam PP no 30 tahun 2007 pasal 17 menyatakan bahwa;

- (1) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

Bahasa pidato pejabat memiliki ranah tersendiri, sebagai seorang pejabat publik dan sebagai pemegang tampuk pemerintahan provinsi tentu saja merupakan figur tersendiri bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bahasa yang digunakan pasti memiliki koridor tersendiri atau bisa juga memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh orang awam. Bukan berarti sebagai pemimpin tidak boleh salah dalam penggunaan bahasanya, setidaknya hal ini bisa diminimalisir baik secara makna maupun kosa kata yang dipilih.

Sebaliknya, orang awam berpendapat bahwa bahasa pejabat akan lebih bisa masuk atau mengena kepada rakyatnya karena pejabat merupakan sosok figur yang layak untuk diteladani ataupun dicontoh. Di sisi lain, kepatutan bahasa bagaimanakah yang dapat menjadi contoh teladan untuk digunakan oleh masyarakat awam? Fenomena lain bahwa bahasa pejabat bisa dikatakan sebagai bahasa yang isi dan kosakatanya selalu benar. Padahal belum tentu, ada keterbatasan pengetahuan bahasa yang membuat hal ini terjadi.

Ragam bahasa naskah pidato merupakan bahasa formal menurut Suhardi dan Sembiring (2005) ragam bahasa formal ditandai oleh bentuk kata dan kalimat yang lengkap dan akurat. Dengan ujaran yang lengkap dan akurat tersebut, tercermin jarak hubungan dan situasi formal di antara peserta pembicara.

Bahasa dalam naskah pidato merupakan bahasa resmi kenegaraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24, tahun 2009, Bab III, pasal 28, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Yang dimaksud pidato

resmi adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.

C. Rudyyanto (2011; 242) dalam makalahnya yang berjudul "*Mencari Penutur Model Bahasa Indonesia: Guru, Birokrat, dan Jurnalis*" menjelaskan bahwa cara berbahasa kita lebih ditentukan oleh faktor kebiasaan mengikuti saja apa yang dilakukan orang. Situasi seperti ini menunjukkan adanya penutur yang dijadikan model, baik perseorangan maupun kelompok. Yang dijadikan model dalam berbahasa biasanya pemimpin masyarakat, pejabat, atau sosok yang menjadi anutan. Begitu juga mereka adalah sekalangan penutur yang memiliki kewibawaan yang bersumber dari jabatan, kedudukan, atau profesinya.

Pemakaian bahasa yang mendominasi pajanan (*exposure*) penutur yang lain secara intesif juga berpeluang menjadi anutan walau sering tanpa disadari. Dengan demikian, pejabat pemerintahan, tokoh partai, politikus, tokoh masyarakat, dan agama, para penulis dan sastrawan, artis, dosen dan guru, jurnalis, dan sebagainya adalah penutur yang pemakaian bahasanya sangat potensial menjadi model bagi penutur lainnya.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa seorang pejabat dapat memengaruhi masyarakatnya hanya dengan bahasanya, bahasa birokrasi dalam kadar tertentu juga menjadi anutan. Mungkin tidak cukup sering masyarakat umum berhadapan langsung dengan birokrat, tetapi tidak berarti mereka jarang terekspos pada pemakaian bahasa birokrat. Masyarakat terekspos pada pemakaian bahasa birokrat melalui pengumuman, edaran, surat dinas, formulir isian, teks peraturan, dan ujaran baik langsung maupun lewat media massa. Bahasa birokrat itu tidak jarang terimak (*imitated*) dalam kegiatan sosial mereka: surat menyurat, pengumuman, pidato sambutan, atau pembicaraan dalam rapat di tingkat RT-RW atau organisasi kemasyarakatan yang lain.

Peneliti tertarik untuk meneliti naskah pidato pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 dihadapan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bukan meneliti materi/isi pokok pencapaian kinerja pemerintahan, namun ragam bahasa dalam naskah pidato pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Barat. Alasannya, sebagai seorang kepala pemerintah provinsi tentunya gubernur merupakan seorang figur dalam memakai bahasa Indonesia ragam lisan (pidato) dan pemakaian ragam bahasa Indonesia ragam tulisan (naskah). Dengan kata lain, seorang kepala pemerintah daerah seharusnya sudah mampu dan terampil memakai bahasa Indonesia ragam tulis, terlebih-lebih dalam naskah pidato pertanggungjawaban, sebab sebuah naskah pidato kepala daerah merupakan dokumen dalam suatu pemerintahan.

Naskah pidato tersebut didasarkan pada data akurat dan pemakaian bahasa Indonesia memenuhi pemakai bahasa Indonesia ragam tulis baku. Hal ini sejalan dengan pendapat Keraf (dalam Lismelinda, 2004:106) tiga langkah yang harus disiapkan seseorang sebelum berbicara atau berpidato, yakni meneliti masalah, menyusun uraian, dan mengadakan latihan. Ketiga langkah tersebut dibagi lagi yakni menentukan maksud, menganalisis pendengar dan situasi, membuat kerangka uraian, menguraikan secara mendetail, dan berlatih dengan suara nyaring.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pilihan kata (diksi) yang digunakan pada pidato Gubernur Kalimantan Barat?
2. Bagaimanakah ejaan yang digunakan pada pidato Gubernur Kalimantan Barat khususnya huruf kapital dan tanda baca?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pilihan kata (diksi) yang digunakan pada pidato Gubernur Kalimantan Barat dan ejaan yang digunakan khususnya

huruf kapital dan tanda baca naskah pidato Gubernur Kalimantan Barat.

Agar penelitian ini lebih terarah, khususnya dalam pengumpulan data, perlu adanya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini meliputi penggunaan pilihan kata (diksi) yang terdapat pada naskah pidato Gubernur Kalimantan Barat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2012; penelitian ini mencermati pemakaian huruf kapital dan tanda baca yang terdapat pada naskah pidato Gubernur Kalimantan Barat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2012; pidato yang diteliti adalah yang berhubungan dengan faktor kebahasaan dalam bentuk naskah tertulis pidato Gubernur Kalimantan Barat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2012.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori bahasa, khususnya pada bahasa naskah pidato, sehingga pemakaian pilihan kata dan ejaan dapat sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Secara praktis hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi pengguna bahasa terutama konseptor naskah pidato untuk kepentingan kebahasaan khususnya yang berkaitan dengan pilihan kata (diksi) dan ejaan (huruf kapital dan tanda baca) agar kesalahan dapat diminimalisasi pada ragam bahasa pidato. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian lebih lanjut bagi peneliti.

## Landasan Teori

### Laras Bahasa

Laras bahasa (bahasa Inggris : *register*) adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas diantara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Sebagaimana pendapat Joos (1961) membagi lima laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu (1) beku (*frozen*), (2) resmi (*formal*), (3)

konsultatif (*consultative*), (4) santai (*casual*), dan (5) akrab (*intimate*).

*Ragam beku* digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. *Ragam resmi* digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. *Ragam konsultatif* digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. *Ragam santai* digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. *Ragam akrab* digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim.

### Retorika

Hal yang berkaitan dengan penelitian ini tentu saja tentang retorika. Definisi retorika menurut Keraf (2000:1-3) adalah suatu istilah yang secara tradisional diberikan pada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Jadi ada dua aspek yang perlu diketahui seseorang dalam retorika, yaitu pengetahuan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa dengan baik, dan kedua pengetahuan mengenai obyek tertentu yang akan disampaikan dengan bahasa tadi. Retorika merupakan teknik pemakaian bahasa sebagai seni, baik lisan maupun tertulis, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik.

Landasan teori dalam penelitian ini yaitu teori diksi. Keraf dalam Damayanti (2013:7) mengemukakan bahwa diksi atau pilihan kata selalu mengandung ketepatan makna dan kesesuaian situasi dan nilai rasa yang ada pada pembaca atau pendengar. Menurut Keraf terdapat tiga kesimpulan utama mengenai diksi, antara lain sebagai berikut.

a. Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagasan, bagaimana

membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat.

b. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar.

c. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan penguasaan sejumlah besar kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa diksi adalah pemilihan dan pemakaian kata oleh pengarang dengan mempertimbangkan aspek makna kata yaitu makna denotatif dan makna konotatif sebab sebuah kata dapat menimbulkan berbagai pengertian.

Mustakim (1994,41) pilihan kata adalah hasil dari proses atau tindakan memilih kata. Terbagi tiga kriteria dalam pemilihan kata yaitu; kecermatan, ketepatan, dan keserasian. Artinya gagasan yang dituangkan dalam sebuah kalimat hendaknya berpedoman pada ketepatan pilihan kata sesuai konteks.

Selain teori tersebut, penulis juga menggunakan teori tentang ejaan, tentunya teori yang digunakan adalah teori yang berhubungan erat dengan pemakaian ejaan, yaitu *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Pusat Bahasa 2002) khususnya tentang huruf kapital dan tanda baca.

### Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penggunaan bahasa Indonesia yang meliputi aspek pilihan kata (diksi) dan ejaan yang terdapat pada pidato Gubernur Kalimantan Barat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2012. Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan mendapatkan data naskah pidato untuk dianalisis secara interpretasi.

Data dalam penelitian ini adalah pilihan kata (diksi), ejaan khususnya pemakaian huruf kapital dan tanda baca yang terdapat pada naskah pidato Gubernur Kalimantan Barat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2012. Pidato tersebut melaporkan pencapaian seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 yang dilaporkan pada bulan Agustus tahun 2012. LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah pidato Gubernur Kalimantan Barat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2012 dihadapan DPRD pada masa jabatan sebagai Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan Diksi

#### 1 Kecermatan

##### - Penyingkatan kata

Kata sapa **Sdr** pada awal pidato yang ditulis dengan singkat tidak tepat. Hampir semua kalangan yang disapa tertulis dengan singkatan **Sdr**. Data yang penulis peroleh sebagai berikut.

1. **Sdr**. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. **Sdr**. Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
3. **Sdr**.Rekan-rekan Anggota FORKORPIMDA/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. **Sdr**.DANLANUD Supadio, DANLANAL Pontianak, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, dan Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat;
5. **Sdr**. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Kalimantan Barat;

6. **Sdr.** Konsul Malaysia di Pontianak;
7. **Sdr.** Para Pimpinan Wilayah Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Para Wartawan, serta Hadirin, dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Pada data 1-7 kata **Sdr** yang tepat adalah dengan dicantumkan secara lengkap yaitu Saudara. Perbaikan pada data 1-7 sebagai berikut.

- 1a. **Saudara** Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2a. **Saudara** Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- 3a. **Saudara** Rekan-rekan Anggota FORKORPIMDA/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 4a. **Saudara** DANLANUD Supadio, DANLANAL Pontianak, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, dan Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat;
- 5a. **Saudara** Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Kalimantan Barat;
- 6a. **Saudara** Konsul Malaysia di Pontianak;
- 7a. **Saudara** Para Pimpinan Wilayah Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Para Wartawan, serta Hadirin, dan Undangan sekalian yang berbahagia.
8. Sdr.Rekan-rekan Anggota **FORKORPIMDA/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah** Provinsi Kalimantan Barat.

Pada data 8 penyingkatan kata **FORKORPIMDA** lebih baik ditulis terlebih dulu penjelasannya setelah itu baru dipersingkat. Perbaikannya sebagai berikut.

- 8a. Sdr.Rekan-rekan Anggota **Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/ FORKORPIMDA** Provinsi Kalimantan Barat.

## 2 Keserasian

### - Penalaran

9 Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya....

Data 9 kata penghargaan **setinggi-tingginya** tidak tepat karena ukuran penghargaan itu tidak dapat diukur secara standar ukuran, lebih tepatnya kata setinggi-tingginya diubah menjadi **kehormatan** atau **tanda jasa** karena bentuk dari penghargaan itu sendiri dapat dirasakan dalam bentuk penghormatan agar selalu dikenang.

10 ....dan ucapan terima kasih yang **sebesar-besarnya** kepada segenap masyarakat Kalimantan Barat....

11 Terima kasih yang **sebesar-besarnya** juga saya sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan...

Pada data 10 dan 11 kata **sebesar-besarnya** juga tidak dapat berterima secara nalar karena ucapan terima kasih tidak dapat diukur seberapa beratnya dan sangat abstrak, lebih baik kata tersebut diubah menjadi kata **tulus** karena kata setulusnya merupakan ungkapan perasaan dari hati sehingga sangatlah tepat menggunakannya.

Perbaikan sebagai berikut.

10a. ....dan ucapan terima kasih **tulus** kepada segenap masyarakat Kalimantan Barat....

11a. Terima kasih yang **tulus** juga saya sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan...

12 ....kami telah bersungguh-sungguh mematuhi dan **mendasarkan diri** pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Data 12 kata **mendasarkan diri** tidak tepat karena makna yang ambigu dan justru membingungkan. Kata yang tepat untuk

kalimat 12 agar kalimat sejajar dengan kata sebelumnya yaitu menggunakan kata **melaksanakan** diikuti dengan kata dasar-dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut perbaikannya.

12a ....kami telah bersungguh-sungguh mematuhi dan **melaksanakan dasar-dasar** ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

13 ....sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, dalam **mengejar ketertinggalan** dari daerah lain yang lebih maju.

Data 13 kata **mengejar ketertinggalan** merupakan kata yang tidak tepat karena kata dasar dari mengejar menurut KBBI (2001) yaitu **kejar** yang bermakna *v* berlari buru-memburu; saling (bergantian), kata **mengejar** sendiri bermakna **1** berlari untuk menyusul (menangkap dsb); memburu; **2** *ki* berusaha keras hendak mencapai (mendapatkan dsb); menginginkan dng sungguh-sungguh. Sementara makna dari ketertinggalan adalah *n* keadaan tertinggal, berarti jika digabungkan makna tersebut menjadi berusaha keras hendak mencapai (mendapatkan dsb) atau menginginkan dgn sungguh-sungguh keadaan yang tertinggal yang berarti jalan di tempat sehingga makna yang tepat untuk data 13 yaitu jika tetap menggunakan kata mengejar dapat menjadi **mengejar kemajuan** (KBBI 2001, *n* hal keadaan maju tt kepandaian, pengetahuan, dsb) atau bisa **memajukan** yang bermakna membawa keadaan yang lebih baik atau sempurna. Perbaikan sabagai berikut.

13a ....sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, dalam **mengejar kemajuan** dari daerah lain yang lebih maju.

### 3 Ketepatan

#### - Kata Asing

Penggunaan kata asing dapat dilakukan jika diawali dengan kata bahasa Indonesia baru bisa diikuti kata asing. Berikut data-data yang terjaring penggunaan kata asing yang justru tercantum tanpa didahului dengan bahasa Indonesia.

14 ... dan seluruh **stakeholders** pembangunan daerah akan bekerja.

15 ....maka telah diberikan **Investment Award** bagi penyelenggara PTSP terbaik...

16 ...sebagai apresiasi atas **concern** di dalam membuat pertanggungjawaban kinerja dan menyediakan informasi kinerja.

17 ...**hearing** atau dialog; **workshop** penguatan kapasitas DPRD; bimtek peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD...

18 Selanjutnya untuk menjamin agar prinsip-prinsip **good governance** dapat diwujudkan....

Dari data 14-18 tidak tepat karena audiensi tidak semua juga memahami arti kata dalam bahasa asing sehingga perlu perbaikan dengan didahului pencantuman kata dalam bahasa Indonesia terlebih dulu. Apalagi pada data 18 penulisan kata **governance** tidak tepat karena tidak bermakna dalam penulisan bahasa asing yang tepat yaitu **government**. Perbaikan sebagai berikut.

14a ... dan seluruh **pemangku kebijakan (stakeholders)** pembangunan daerah akan bekerja.

15a ....maka telah diberikan **penghargaan investasi (Investment Award)** bagi penyelenggara PTSP terbaik...

16a ...sebagai apresiasi atas **perhatian (concern)** di dalam membuat pertanggungjawaban kinerja dan menyediakan informasi kinerja.

17a ...**mendengarkan (heard)**; lokakarya (**workshop**) penguatan kapasitas DPRD; bimtek peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD...

18a Selanjutnya untuk menjamin agar prinsip-prinsip **pemerintah yang layak (good government)** dapat diwujudkan....

### 4 Huruf Kapital

Ketidaktepatan pada penggunaan huruf kapital terdapat pada beberapa data di bawah ini.

- 19 ...telah menghantarkan kami untuk kembali memimpin Kalimantan Barat pada **Masa Jabatan Kedua Tahun 2013-2018**.
- 20 ...Provinsi Kalbar telah mendapatkan penghargaan dari BAPPENAS sebagai **Provinsi** yang telah menyelesaikan penyusunan **Rencana Aksi** tepat waktu.
- 21 ... dukungan dana BOS yang biaya satuannya semakin mencukupi, bantuan **Beasiswa Siswa Miskin**,....
- 22 .... serta dengan mengadakan kunjungan ke **Rumah Sakit Daerah** untuk melihat pelaksanaan tata laksana tersebut.
- 23 RSUD dr. Soedarso pada Tahun 2012 tetap merupakan **Rumah Sakit Rujukan** tertinggi di Provinsi Kalbar, dan telah terakreditasi sebagai **Rumah Sakit Pendidikan** oleh Kementerian Kesehatan melalui kegiatan peningkatan standarisasi pelayanan **Rumah Sakit**.
- 24 Sementara itu, kondisi **Jalan Nasional** yang diprogramkan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII di Banjarmasin...
- 25 Sektor Cipta Karya, dengan kegiatan antara lain peningkatan **Rumah Tangga** pengguna air bersih yang meningkat menjadi 87,56%....
- 26 Selanjutnya pelaksanaan urusan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) **Sukses Pembangunan Pertanian**...
- 27 Selain itu, telah pula dilakukan pembinaan sistem kerja latihan dan kunjungan, pembinaan **Kader Penyuluh Desa Model**, fasilitasi **Kontak Tani Nelayan Andalan**...
- 28 Selanjutnya pada Tahun 2012, **Pemerintah Provinsi** kembali menerima penghargaan dari **MenPAN** dan **Reformasi Birokrasi**...
- 29 **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** pada Tahun 2011 sebesar 83,9 milyar rupiah...
- 30 Terkait dengan **Penanggulangan Bencana Daerah**, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain **Posko Kesiapsiagaan Bencana**...
- Data 19-30 huruf kapital yang ditulis di tengah kalimat tidak tepat karena huruf kapital haruslah ditulis di awal kalimat (EYD, 2002:7). Perbaiki sebagai berikut.
- 19a ...telah menghantarkan kami untuk kembali memimpin Kalimantan Barat pada **masa jabatan kedua tahun 2013-2018**.
- 20a ....Provinsi Kalbar telah mendapatkan penghargaan dari BAPPENAS sebagai **provinsi** yang telah menyelesaikan penyusunan **rencana aksi** tepat waktu.
- 21a ... dukungan dana BOS yang biaya satuannya semakin mencukupi, bantuan **beasiswa siswa miskin**,....
- 22a .... serta dengan mengadakan kunjungan ke **rumah sakit daerah** untuk melihat pelaksanaan tata laksana tersebut.
- 23a RSUD dr. Soedarso pada Tahun 2012 tetap merupakan **rumah sakit rujukan** tertinggi di Provinsi Kalbar, dan telah terakreditasi sebagai **rumah sakit pendidikan** oleh Kementerian Kesehatan melalui kegiatan peningkatan standarisasi pelayanan **rumah sakit**.
- 24a Sementara itu, kondisi **jalan nasional** yang diprogramkan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII di Banjarmasin...
- 25a Sektor Cipta Karya, dengan kegiatan antara lain peningkatan **rumah tangga** pengguna air bersih yang meningkat menjadi 87,56%....
- 26a Selanjutnya pelaksanaan urusan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) **sukses pembangunan pertanian**...
- 27a Selain itu, telah pula dilakukan pembinaan sistem kerja latihan dan kunjungan, pembinaan **kader penyuluh desa model**, fasilitasi **kontak tani nelayan andalan**...
- 28a Selanjutnya pada Tahun 2012, **pemerintah provinsi** kembali

menerima penghargaan dari **Menpan dan reformasi birokrasi...**

29a **Lain-lain pendapatan yang sah** pada Tahun 2011 sebesar 83,9 milyar rupiah...

30a Terkait dengan **penanggulangan bencana daerah**, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain **posko kesiapsiagaan bencana...**

Huruf kapital dapat digunakan apabila diikuti nama geografi (EYD,2002:8). Ketidaktepatan penggunaan huruf kapital yang tidak diikuti nama geografi tetapi memaksakan diri untuk menggunakan huruf kapital. Jika memang tetap menggunakan huruf kapital sebaiknya diikuti nama geografi. Berikut data-data yang tidak tepat.

31 Mulai tahun ini, **Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota**, dan seluruh *stakeholders* pembangunan daerah akan bekerja.

32 Untuk urusan pendidikan, **Pemerintah Provinsi** selalu berusaha meningkatkan pembangunan pendidikan.

33 Program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh **Rumah Sakit Jiwa Provinsi** meliputi pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan.

34 .... fasilitasi kunjungan kerja **Pejabat Negara**, peningkatan peran **Gubernur** sebagai **Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi**, penegasan batas daerah antar **Kabupaten/Kota**, serta fasilitasi pembentukan **Daerah Otonom Baru** dan evaluasinya.

35 Kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan **Sekretariat DPRD Provinsi**, antara lain memfasilitasi kunjungan kerja **Pimpinan dan Anggota DPRD** ke dalam dan ke luar daerah....

Pada data 31-35 huruf kapital yang berdiri sendiri di tengah kalimat tidak tepat jika konseptor pidato ingin tetap menggunakan huruf kapital perlu mencantumkan nama geografi. Perbaikannya sebagai berikut.

31a Mulai tahun ini, **Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**, pemerintah

**kabupaten/ kota**, dan seluruh *stakeholders* pembangunan daerah akan bekerja.

32a Untuk urusan pendidikan, **Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat** selalu berusaha meningkatkan pembangunan pendidikan.

33a Program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh **Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat** meliputi pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan.

34a .... fasilitasi kunjungan kerja **pejabat negara**, peningkatan peran **gubernur** sebagai **wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat**, penegasan batas daerah antarkabupaten/kota, serta fasilitasi pembentukan **daerah otonom baru** dan evaluasinya.

#### - **Tanda Baca**

Ketidaktepatan penggunaan tanda baca dijamin pada data di bawah ini yaitu kesalahan penggunaan titik dua (:), dan tanda koma (,).

35 Dalam kebijakan umum tersebut, terdapat 7 (tujuh) program prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur, manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar;
6. Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan;
7. Meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai, serta ketahanan budaya.

Data 35 penggunaan titik dua (:) tidak tepat karena kalimat tersebut bukan kalimat lengkap sehingga perlu penambahan kata untuk melengkapi keterangan. Atau bisa juga

titik dua dihilangkan saja disebabkan karena masih ada rincian yang dijabarkan dalam kalimat berikutnya. Perbaiki data 35 di bawah ini.

- 35a. Dalam kebijakan umum tersebut, terdapat 7 (tujuh) program prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk
1. meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  2. meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia;
  3. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  2. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur, manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik;
  3. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar;
  4. meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan;
  5. meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai, serta ketahanan budaya.

- **Tanda Koma (,)**

36. Terkait dengan Penanggulangan Bencana Daerah, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain Posko Kesiapsiagaan Bencana; pengadaan sarana, prasarana evakuasi bencana, dan pendistribusian logistik bencana; pemantauan kerusakan pada daerah rawan bencana; pendataan lokasi pasca bencana; serta Rakor Penanggulangan Bencana.
37. ... urusan pilihan yang meliputi urusan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, ketransmigrasian, perkebunan, serta urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Ketidaktepatan penggunaan tanda koma terdapat pada data 36-37. Penggunaan tanda seharusnya terinci dan taat azas. Perbaikannya sebagai berikut.

- 36a. Terkait dengan penanggulangan bencana daerah, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain posko

kesiapsiagaan bencana; pengadaan sarana, prasarana evakuasi bencana, pendistribusian logistik bencana, pemantauan kerusakan pada daerah rawan bencana, pendataan lokasi pasca bencana, dan Rakor Penanggulangan Bencana.

- 37a. ... urusan pilihan yang meliputi urusan kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, energi, sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, ketransmigrasian, perkebunan, dan urusan peternakan, serta kesehatan hewan.

### **Penutup Simpulan**

Hasil dari penelitian ini yaitu masih terdapat ketidaktepatan penggunaan pilihan kata (diksi) di antaranya kecermatan dalam penyingkatan kata, ketepatan dalam mengungkapkan kata ke dalam konteks kalimat dengan menggunakan kata asing, dan keserasian dalam penalaran. Penggunaan huruf kapital yang dicantumkan di tengah kalimat yang tidak taat asas. Ejaan yang digunakan terutama penggunaan huruf kapital dengan tidak mencantumkan nama geografi yang merupakan kesalahan besar. Pencantuman tanda baca titik dua dan titik koma yang tidak tepat.

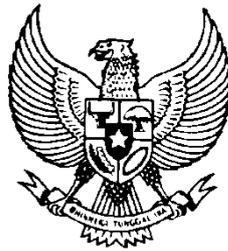
### **Saran**

Bahasa dalam naskah pidato merupakan bahasa resmi dan dalam situasi resmi. Meskipun penyusunan naskah pidato dilakukan oleh konseptor tidak menutup kemungkinan untuk lebih banyak menimba ilmu kebahasaan secara baik dan benar. Apalagi pembacaan pertanggungjawaban kerja yang disampaikan oleh gubernur melibatkan banyak pemangku jabatan di daerah yang notabene tingkatan bahasa yang dimiliki akan lebih baik dan menjadi figure masyarakatnya. Sehingga akan sangat penting bagi konseptor naskah untuk mengetahui lebih dalam penggunaan diksi dan ejaan yang tepat, karena apabila kesalahan terus menerus dilakukan akan sangat rawan diikuti oleh masyarakat yang berpendapat bahwa hal ini tetap benar.

### Daftar Pustaka

- Damayanti, Wahyu. 2013. *Kesalahan Bahasa dalam Berkomunikasi di Media Televisi (Studi Kasus Diksi Running Text TV One)*. Makalah pada seminar Bahasa, Sastra, Budaya, dan IPTEK di Pontianak 9 Maret 2013. Balai Bahasa Kalimantan Barat.
- Keraf, Gorys. 2000. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Lismelinda. 2004. *Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Siswa SLTA*. Balai Bahasa Padang.
- Joss. 1961 dalam <http://egga.web.id/2013/09/ragam-dan-laras-bahasa/> diunduh tgl 18 November 2014 pkl.8.21.
- Mustakim. 1994. *Membina Kemampuan Berbahasa: Panduan Ke Arah Kemahiran Berbahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2002.. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*.
- Ruddyanto, C. 2011. "Mencari Penutur Model Bahasa Indonesia: Guru, Birokrat, dan Jurnalis" dalam *Risalah Konggres Bahasa Indonesia VIII*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suhardi, Sembiring.2005. "Aspek Sosial Bahasa"dalam *Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Nomor 24 Tahun 2009. *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebahasaan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Tahun 2011.

## Lampiran



### GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PIDATO**  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012**

**di hadapan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat**  
**Pontianak, Selasa / 26 Maret 2013**

---

**Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata.**

**Yang Terhormat,**

- Sdr. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Sdr. Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- Sdr. Rekan-Rekan Anggota FORKORPIMDA/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Sdr. DANLANUD Supadio, DANLANAL Pontianak, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, dan Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat;
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Kalimantan Barat;
- Sdr. Konsul Malaysia di Pontianak;
- Sdr. Para Pimpinan Wilayah Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Para Wartawan, serta Hadirin, dan Undangan sekalian yang berbahagia.

***Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,***

Sudah layak dan sepantasnyalah pada kesempatan berbahagia ini, kita semua menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan berkat dan kasih-Nya, kita berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat hadir dalam acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012.

Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap masyarakat Kalimantan Barat atas partisipasinya dalam mensukseskan Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Tahun 2012, terutama bagi mereka yang telah

menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, telah menghantarkan kami untuk kembali memimpin Kalimantan Barat pada Masa Jabatan Kedua Tahun 2013-2018.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan, dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang telah menjadwalkan Rapat Paripurna pada hari ini. Penyampaian LKPJ ini, merupakan wujud pertanggungjawaban atas semua kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mengemban tugas selaku Gubernur Kalimantan Barat, sekaligus merupakan kewajiban yang harus disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.**

*Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.*

Tahun 2012, merupakan tahun kelima kami melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat, sesuai visi "**Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, dan Sejahtera**", kami telah bersungguh-sungguh mematuhi dan mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas kami pada umumnya telah dapat berjalan lancar, dan secara nyata telah memberikan perubahan serta kemajuan bagi Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini semuanya berkat limpahan kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dukungan seluruh komponen masyarakat beserta aparatur Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan khususnya dukungan dari segenap Anggota Dewan yang terhormat.

Kami menyadari, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Tantangan tersebut merupakan dinamika proses pembangunan yang harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.*

Laporan keterangan pertanggungjawaban yang saya sampaikan ini merupakan gambaran umum pelaksanaan program prioritas dan strategis selama Tahun Anggaran 2012. Adapun data lebih rinci yang disampaikan dalam Bab I sampai dengan VII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah pidato ini.

Selanjutnya dikemukakan bahwa kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2012 pada dasarnya merupakan rencana kerja yang menguraikan strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Dalam kebijakan umum tersebut, terdapat 7 (tujuh) program prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk :

1. **Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;**
2. **Meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia;**
3. **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;**
4. **Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur, manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik;**
5. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar;**
6. **Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan;**

## **7. Meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai, serta ketahanan budaya.**

Ketujuh program prioritas itu diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah ini, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan pengangguran, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.

Kita semua patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita tahun 2012 mencapai angka 5,84%. Angka ini sudah lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi Kalbar yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, yaitu pada kisaran 4,8% sampai dengan 5,4%. Namun demikian, angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang mencapai 5,94%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil dari terus meningkatnya investasi PMDN dan PMA.